

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu tempat yang menggambarkan antar manusia hidup dan tinggal bersama-sama yang mana dalam menjalani kehidupan kesehariannya saling mengenal dan bergotong-royong untuk mencapai tujuan kolektifnya. Pada umumnya manusia-manusia yang tinggal di desa ini hidup dari mata pancahariannya sebagai petani, namun meskipun demikian masyarakat yang tinggal di desa satu dengan desa lainnya harus menyesuaikan kondisi geografis masing-masing desa untuk bertani. Seperti contohnya desa yang terletak di pesisir pantai masyarakatnya bekerja sebagai petani ikan, kemudian desa dengan struktur tanah yang bagus dimanfaatkan sebagai tumbuhan yang menghasilkan berbagai kebutuhan-kebutuhan pokok untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual untuk mendapatkan uang.

Ada tiga aspek besar yang bisa menggambarkan desa dilihat dari aspek sosiologi desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap pada suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dilihat dari aspek ekonomi desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Ketiga adalah aspek politik dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1965), Desa merupakan kesatuan hukum yang berisikan kelompok masyarakat yang memiliki kuasa untuk membuat pemerintahannya sendiri, yang artinya adalah dalam suatu desa sudah pasti

memiliki orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Golongan orang yang memerintah dalam lingkup desa yaitu dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi struktur pemerintahan desa, sedangkan golongan orang yang diperintah adalah seluruh masyarakat yang ada di lingkup desa yang wajib mengikuti peraturan yang dibuat oleh golongan orang yang memerintah.

Unang Sunarjo (1984) menjelaskan mengenai tugas-tugas serta kewenangan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan serta dipercaya untuk memimpin segala aspek tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa pun juga dalam bidang pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam kata lain pemerintahan desa merupakan pengemudi utama yang mengatur kemana arah dan tujuan suatu desa yang dipimpinnya.

Pemerintah pusat telah mendukung penuh kemajuan desa yaitu dalam diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam hal ini desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang didasarkan pada Undang-undang tersebut, harus dilakukan upaya-upaya yang cerdas dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa agar bermanfaat untuk orang banyak dalam hal pengentasan kemiskinan, untuk itu pemerintah pusat memberikan kewajiban desa sebagai wilayah otonom untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa. Kepentingan bersama yang paling utama pada sebuah desa adalah bagaimana mengelola segala aset yang dipunyai oleh desa agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Baiknya pengelolaan aset desa menjadi garda terdepan dalam menggapai kemakmuran dan kesejahteraan desa.

Diwajibkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes oleh pemerintah pusat membawa perubahan yang sangat drastis bagi perekonomian masyarakat yang ada di desa. Dibentuknya BUMDes ini diharapkan dapat

digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan desa. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut semakin memperjelas dan menempatkan BUMDes sebagai badan yang lebih strategis dan teratur. Usaha-usaha kecil masyarakat ini akan disaring dan dikelola secara professional oleh seluruh elemen yang ada di desa. BUMDes merupakan lembaga yang sepenuhnya dinaungi oleh desa itu sendiri. Secara tidak langsung, lembaga ini membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat desa yang nantinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Sejak diberlakukannya Peraturan tentang pembentukan BUMDes, maka secara mengikat seluruh desa wajib mempunyai BUMDes. Program pemerintah yang terkesan memaksa tersebut membuat banyak dari masyarakat maupun pemerintah di desa harus siap mengelola dan harapannya dapat membantu meningkatkan ekonomi desa.

Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan BUMDes, banyak desa-desa yang masih mengalami kebuntuan dalam pengembangannya. Dalam website (kemendesa.go.id) dimuatkan bahwa per tahun 2018 Jumlah BUMDes telah mencapai 6 kali lipat dari apa yang telah ditargetkan pemerintah pusat, namun BUMDes yang telah terbentuk ini masih hanya sekedar “ada” saja, artinya belum ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat desa di dalam BUMDes yang menghasilkan sesuatu untuk memajukan perekonomian mereka, masih terjadi kebuntuan pemerintahan desa dalam mengurus BUMDes. Bahkan tidak sedikit elite – elite yang memegang fungsi penting di sebuah desa dan menjabat pada lembaga formal tidak mengetahui banyak tentang pemahaman mengapa BUMDes ini dibentuk. Pemerintah pusat yang diwakilkan Kementerian Desa PDTT telah melakukan sosialisasi besar-besaran diseluruh pelosok desa-desa tentang BUMDes ini. Namun, masih banyak masyarakat desa yang belum memahami sepenuhnya karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang tentunya menghambat berjalannya BUMDes karena kualitas SDM menjadi modal utama dalam merumuskan suatu kebijakan yang strategis.

Dampak dari adanya pengelolaan BUMDes secara baik dan teratur tidak hanya pada sisi meningkatnya perekonomian dan pendapatan di suatu desa saja, melainkan pada sisi pelayanan publik, pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti perbaikan jalan, sekolah, puskesmas, taman hiburan, dan lain sebagainya akan cepat terlaksanakan berkat keuntungan yang didapat dari BUMDes.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari sebuah desa. Untuk itu diperlukan pemahaman penting bahwa BUMDes ini merupakan suatu lembaga yang harus ada dalam suatu desa yang nantinya akan mengembangkan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan desa. Dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus melibatkan seluruh lapisan yang ada di desa baik struktur formal maupun informal. Pengelolaan yang baik nantinya akan menjadikan sinergitas yang terjalin sangat harmonis dan memperkuat budaya masyarakat desa yaitu kekeluargaan & gotong - royong untuk pembangunan ekonomi di sebuah desa. Keuntungan yang dirasakan seluruh lapisan yang ada di desa ini sudah sewajarnya dirasakan mengingat BUMDes ialah badan yang bertugas untuk mengelola seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki desa. Pendekatan gotong – royong yang partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dari pembentukan, pelaksanaan, serta pengawasan. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sehingga pembangunan dan peningkatan ekonomi pedesaan.

Dalam pembuatan dan pengelolaan BUMDes pasti tidak terlepas dari adanya pengaruh politik yang ada, dimana selalu memiliki muatan kepentingan yang akan berpengaruh. Dalam awal pembuatan BUMDes dilakukan melalui Musyawarah Desa yang didalamnya memuat pola konsolidasi antar pelaku dalam melakukan keputusan politik. Pelaku kepentingan memiliki kekuasaan tersendiri dalam pengelolaan BUMDes yang nantinya akan saling menguntungkan dan memunculkan relasi diantaranya.

Elite adalah konsep didasarkan pada tindakan logis dan tindakan non-logis. Tindakan logis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai arah tujuan. Sedangkan nonlogis yaitu tindakan-tindakan yang tidak diarahkan kepada suatu tujuan yang jelas. Pareto menjelaskan secara lebih dalam tentang kepentingan utama dari elite yaitu “residu kombinasi” dan “residu keuletan bersama” yang diartikan dengan kelicikan dan kekejaman. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa tidak lepas dengan adanya elite yang berada pada structural pemerintahan desa ataupun non - struktural dalam pemerintahan desa. Elite merupakan kumpulan individu tau kelompok kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat biasanya dan orang yang memiliki kekuasaan dalam sebuah posisi pada lingkungannya.

Dalam pembangunan perekonomian desa melalui BUMDes, elite berfungsi untuk membuat keputusan politik yang akan dijalankan, dan hal ini juga digunakan para elite untuk mempertahankan jaringan-jaringan atau kekuasaan di desa. Peran elite dan lembaga desa bertujuan untuk mengontrol dan mengintervensi pengelolaan, dalam kontrol dan intervensi elite sendiri terdapat unsur politis. Intervensi elite dalam pengelolaan BUMDes secara tidak langsung telah membuat pola relasi yang terbentuk karena kekuasaan elite tersebut, dimana hubungan tersebut menganggap bahwa elite telah memberikan kontribusi untuk masyarakat desa dan kepentingan masyarakat desa dan timbal baliknya untuk elite adalah masyarakat desa akan berkontribusi dan mendorong tercapainya tujuan elite untuk meraih kepentingan di desa tersebut, baik untuk kepentingan masyarakat desa, mempertahankan kekuasaan, maupun untuk pergulatan dalam pilkades.

Elite dalam lingkup desa dapat dikatakan elite lokal ataupun elite setempat, seperti lurah, dan tokoh-tokoh politik maupun agama dan juga pemilik sawah. Kepemimpinan elite tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang asli yaitu kesetiaan buta terhadap orang tua yang memberlakukan mirip dengan cara yang berlaku di kalangan tentara. Pemimpin merupakan tempat meminta petunjuk tentang berbagai

persoalan hidup dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yang biasanya dituruti dengan baik.

Penyelenggaraan pengelolaan BUMDes tidak lepas adanya peran kepala desa dalam perannya sebagai komisaris BUMDes, kemudian juga adanya peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pegawai berjalannya BUMDes. Dalam pemerintahan desa yang berada dalam jabatan formal pemerintahan yaitu kepala desa dan Ketua BPD, mereka merupakan elite pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak lepas dengan adanya pengaruh dari elite lainnya yang tidak berada pada struktural pemerintahan desa.

Dalam lingkup desa, dalam pengelolaan BUMDes juga terpengaruh oleh adanya kekuatan sosial yang ada di desa seperti organisasi kemasyarakatan maupun kelompok – kelompok yang tidak mengorganisasikan dirinya. Mereka memiliki kepentingan agar suaranya didengar dan dipenuhi oleh pemerintahan desa. seperti misalnya kelompok rukun nelayan yang diwakilkan Ketuanya menggunakan posisinya dan legitimasi massa untuk memanfaatkan BUMDes agar dapat mengangkat perekonomian kelompoknya melalui kebijakan yang dibuat.

Dikutip dari tirta.id, Orang kaya desa ialah orang yang memiliki kualitas individu sehingga memiliki legitimasi dalam masyarakat desa. Orang kaya desa kepemilikan materialnya biasanya diperoleh dari sawah, usaha lokal, perkebunan, dan lainnya. Adanya hal itu kemudian sangat membantu dalam pembangunan perekonomian desa. Orang kaya desa biasanya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melakukan pembangunan desa, orang kaya desa biasanya disebut sebagai elite ekonomi. (<https://tirta.id/dana-desa-hanya-memberdayakan-elite-desa-bukan-petani-dawv>)

Dalam penelitian (Budiono, 2015) implementasi atas pengelolaan BUMDes yang dilakukan di desa Ngringinrejo bertabrakan dengan kepentingan para pengelolanya. Air adalah potensi yang dimiliki desa untuk kepentingan masyarakat,

namun penguasaan sumber daya tersebut malah dikuasai oleh seorang kepala desa yang berlatarbelakang sebagai pemilik sawah yang memiliki banyak pekerja untuk menggarap sawahnya. Dengan demikian sebagai seseorang yang memiliki pengaruh atas masyarakat yang dipimpinnya, maka Air digunakan sepenuhnya untuk irigasi sawah yang sebagian besar milik kepala desa tersebut, implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di desa Ngringinrejo mengabaikan kepentingan masyarakat desa karena potensi desa seharusnya dimanfaatkan secara bersama.

Nofiratullah (2018) mengatakan bahwa eksistensi BUMDes di desa Soki dalam upaya peningkatan perekonomian desa masih sangat minim, hal tersebut karena sumber daya manusia yang tersedia sangat rendah sehingga BUMDes di desa tersebut hanya sekadar nama saja untuk melaksanakan tuntutan pemerintah pusat. Masyarakat di desa Soki masih sangat bergantung pada bantuan – bantuan pemerintah desa yang dianggarkan dalam ABPDes, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dialokasikannya dana desa untuk BUMDes merupakan hal yang menghambur – hamburkan anggaran. Dalam salah satu informannya mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan BUMDes melainkan cukup dengan gotong – royong saja.

Pengelolaan BUMDes yang baik dan benar sangat menjanjikan kemajuan ekonomi suatu desa, bukti nyatanya yaitu seperti pengelolaan BUMDes di desa Pangkahkulon yang membentuk BUMDes pada tahun 2015, meskipun bisa dikatakan cukup baru namun BUMDes di desa ini dibentuk dengan perencanaan cukup jelas dengan gagasan untuk jangka waktu yang panjang dan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa. Dengan kurun waktu kurang lebih hanya 2 tahun saja, BUMDes di desa Pangkahkulon mampu mengelola sebaik mungkin potensi di desa tersebut dengan membuat gebrakan peluncuran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diberi nama “Gajero”. BUMDes di desa itu juga menarik masyarakat-masyarakat asli desa tersebut untuk dipekerjakan baik pada bidang produksinya maupun sebagai resellernya. Dikabarkan melalui (www.kabarjawatimur.com) Peluncuran AMDK Gajero merupakan produk

unggulan desa sekaligus produksi pertama kali yang ada di Gresik, tentunya hal itu sangat membantu menaikkan perekonomian masyarakat, kabar tentang peluncuran AMDK itu mendapatkan apresiasi langsung dari pemerintah daerah (Wakil Bupati Gresik).

Selain itu, pengoptimalan potensi yang ada di desa Pangkahkulon dapat dilihat dari pengelolaan tangkapan laut yang dapat dijadikan produk unggulan yang bernilai jual tinggi. Dalam hal ini BUMDes bekerjasama secara langsung dengan paguyuban nelayan desa yang mana dalam hal pemasaran ikan hasil tangkapan ataupun dijadikan bahan utama untuk membuat kerupuk. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada tidak jauh dari bibir pantai serta akses yang mudah untuk dilalui menjadikan komoditas ikan laut sangat laku dan dicari-cari oleh para konsumen, permintaan konsumen yang tinggi akan ikan laut merupakan suatu fenomena bahwa pengelolaan BUMDes yang memanfaatkan potensi laut yang ada di Pangkahkulon bisa dibilang sangat berhasil dan membawa manfaat besar bagi perekonomian para nelayan, bahkan para petani tambak pun ikut merasakan perbedaan penjualan yang meroket sangat signifikan sejak adanya TPI, mereka juga diberikan tempat untuk menjajakan hasil panen ikannya.

Keberhasilan tersebut karena pengelola BUMDes mampu memanfaatkan segala peluang yang ada salah satunya dengan pemanfaatan bantuan dari PT. PGN Saka atas tanggung jawab sosialnya terhadap desa Pangkahkulon dimana selaku pihak swasta melakukan produksi minyak dan gas alam kemudian menumbulkan suatu tanggung jawab atau timbal balik kepada desa – desa yang ada disekitarnya. Para elite memanfaatkan hal itu untuk dikelola BUMDes yang kemudian membuat unit – unit usaha didalamnya.

Desa-desa yang ada di sekitaran kabupaten Gresik tidak jarang untuk meminta studi banding. Mereka tertarik untuk studi banding tidak lain karena suksesnya pengelolaan BUMDes yang melibatkan seluruh elemen yang ada pada masyarakat desa setempat. Selain itu mereka juga belajar tentang bagaimana proses

pengelolaan administrasi publik yang berjalan cepat. Dikutip dari (timesindonesia.co.id) bahwa sebuah desa bernama Sedah Kidul yang berada di kabupaten Bojonegoro melakukan studi banding, mereka ingin belajar mengenai pengelolaan UMKM yang memanfaatkan potensi pesisir laut. Mereka juga mempelajari bagaimana desa Pangkahkulon ini mengeluarkan banyak inovasi-inovasi sehingga dijuluki desa berprestasi.

Berbicara tentang suksesnya penataan dan pengelolaan yang baik terhadap BUMDes ini tak lepas dari seluruh struktur lapisan yang ada di desa yang bekerja saling bahu membahu dengan semangat gotong-royongnya. Dicetuskannya BUMDes ini mengartikan juga bahwa elit-elit yang berperan harus mampu melihat dengan teliti atas segala peluang lalu memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam yang dimiliki sebuah desa. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan menentukan prioritas utama yang dibutuhkan seluruh masyarakat desa. Melaksanakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga merupakan salah satu dorongan agar terwujudnya perekonomian desa yang makmur dan sejahtera.

Pengelolaan BUMDes yang terolong sukses di desa Pangkahkulon tidak terlepas dari peran elite – elite yang terlibat, seperti kepala desa yang menjabat juga sebagai komisaris BUMDes juga memiliki andil besar dalam pengelolaannya ditambah juga pengawasan dari BPD sekaligus pemberi kontrol dan evaluasi atas pengelolaannya. Besar kecilnya modal untuk pembuatan dan pengelolaan BUMDes diatur dalam APBDes, kemudian penulis mendapatkan fenomena bahwa dana asli dari APBDes sendiri sangat kecil bila dibandingkan dengan keberhasilan pengelolaannya, sehingga dapat menarik untuk diteliti bagaimana proses daripada pengelolaannya juga meneliti bagaimana elite – elite lokal desa menggunakan BUMDes sebagai arena untuk mendapatkan kepentingannya.

Menurut Coristya Berlian (2013) dalam Jurnal Administrasi Publik menjelaskan Adanya BUMDes ini dapat memberikan dorongan untuk

memunculkan kembali demokrasi sosial di desa dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan serta menghidupkan partisipasi masyarakat agar terus meningkat. pemerintah desa dalam hal ini harus mampu berpikir dengan kreatif serta inovatif karena sudah merupakan tanggung jawabnya dalam pengembangan BUMDes. Dampak positif dari pengembangan yang baik yaitu dapat membuat lapangan pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan produk-produk baru serta pelayanan yang baik bagi konsumen dengan biaya produksi yang rendah bila dibandingkan dengan perkotaan.

Peran seluruh struktur masyarakat yang baik memang sangat dibutuhkan karena menentukan arah pengembangan BUMDes dalam suatu desa, untuk itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana peran seluruh struktur politik yang terlibat di desa Pangkahkulon sehingga dapat menjadikan BUMDes di desa tersebut berjalan dengan sangat optimal hingga dapat dijadikan tauladan bagi desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Gresik. Laju perekonomian yang sangat jauh meningkat dirasakan masyarakat desa Pangkahkulon merupakan salah satu alasan mengapa BUMDes ini layak dikatakan sangat berhasil, dan merupakan suatu peranan besar dari orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Dengan melihat berbagai fenomena yang ada dengan berbagai perspektif membuat peneliti akan berfokus pada permasalahan elite lokal desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Pangkahkulon. Jika penelitian yang sudah ada sebelumnya membahas mengenai implementasi, eksistensi, serta optimalisasi, maka dalam penelitian ini berfokus pada elite – elite desa yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur atau mengemudikan arah pengelolaan BUMDes. Unsur – unsur elite pada desa adalah kajian yang menjadi titik fokus indentifikasinya. Dalam pengel Kepala desa, BPD, Pelaksana Operasional, dan ketua dari organisasi masyarakat sebagai kelompok kepentingan merupakan unsur penting karena yang berpengaruh dalam penentuan arah kebijakan dalam pengelolaan BUMDes. Melalui pendekatan elite ini penulis akan memahami

bagaimana peranan elite, mekanisme, dan proses pengambilan keputusan politik yang ada di desa Pangkahkulon.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah ditulis diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian yang menarik untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Komposisi dan Basis Sosial Ekonomi Elite Lokal di desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Apa Kepentingan Elite Lokal dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siapa saja elite lokal di desa Pangkahkulon dan juga basis sosial ekonomi dari elite itu sendiri,
2. Kemudian juga mengetahui kepentingan tiap – tiap elite serta relasi antar individunya dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di desa Pangkahkulon,

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih yang nantinya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan politik, terutama dalam studi kekuasaan elite lokal desa dan implikasinya pada upaya penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

2. Secara Praktis:

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dari proses ini dapatlah kemudian diketahui bagaimana cara mewujudkan pengelolaan serta kebijakan yang diterapkan Badan Usaha Milik

Desa yang baik serta tidak melibatkan segelintir orang saja, melainkan seluruh elemen di desa. Pengambilan keputusan – keputusan politik haruslah diambil secara kolektif untuk kepentingan publik.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Relasi Kekuasaan

Menurut KBBI Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu, sedangkan relasi kuasa menurut aristianto, dkk (2016) adalah hubungan antara suatu kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kemudian Robert Dahl (1994) kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya. Pemikiran Robert Dahl menekankan pada kekuasaan yang harus disebar luaskan pada berbagai kelompok kepentingan., yang bertujuan untuk agar tidak satu kelompok pun bisa mengklaim sebagai yang paling mewakili rakyat secara keseluruhan. Robert Dahl juga menjelaskan dengan adanya demokrasi harus memberi ruang bagi kekuasaan minoritas atau berbagai minoritas, agar kompetisi antara ragam dan banyak kelompok bisa berlangsung, dan bukan menjadi milik kelompok mayoritas semata.

1.5.2 Kelompok Kepentingan

Menurut Ramlan Surbakti (1992) kelompok kepentingan merupakan satu golongan orang yang memiliki sikap, kepercayaan, sifat, dan tujuan yang sama, dari adanya kesamaan tersebut, mereka kemudian mengorganisasikan golongannya untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kepentingan memiliki pola kepemimpinan yang teratur, system keanggotaan yang jelas, menjalin pola komunikasi yang baik antar invidiunya, serta memiliki sumber keuangan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Kelompok kepentingan digambarkan sebagai orang – orang yang berkelompok menjadi satu untuk menuntut kepentingannya agar tersampaikan dan dipenuhi oleh para pembuat kebijakan.

1.5.3 Basis Sumber Daya Elite dalam Potensi Desa

Potensi desa menurut Soleh (2017) merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai modal yang dimiliki desa untuk dapat dikembangkan yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut Soleh juga menjelaskan bahwa potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu fisik dan non – fisik. Yang termasuk dalam potensi desa fisik yaitu seperti keadaan geografis, iklim, tanah, ternak, dan juga sumber daya manusia. Sedangkan golongan non – fisik adalah masyarakat desa corak budaya gotong – royong dan interaksinya, lembaga dan organisasi sosial desa, serta perangkat dan pamong desa.

Adanya elite dalam suatu masyarakat menurut Keller (1984) adalah karena dalam lingkungannya selalu ada individu – individu yang mempunyai kelebihan daripada masyarakat lainnya, dan dengan semakin heterogen masyarakat maka semakin banyak elite – elite baru yang muncul berdasarkan dimensi kekuasaan yang dimilikinya, dimensi kekuasaan elite sangat bergantung pada basis atau latar belakang munculnya cakupan arena yang dikuasai elite. Meneliti tentang elite lokal desa harus mengetahui basis sosial ekonomi dari elite tersebut. Seperti elite ekonomi memiliki kuasa atas kepemilikan tanah, juragan ataupun pengusaha, kemudian elite agama memiliki kuasa atas kharismatik kepada penganut ataupun murid - muridnya. Hal itu berlaku pada dimensi elite lainnya. Kekuasaan elite itu diperoleh atas kepemilikan dan pengolahan potensi desa mencakup sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kepentingannya. Definisi Sumber daya sendiri menurut Grima dan Berkes (1989) merupakan aset untuk memenuhi kepuasan ataupun utilitas manusia.

Varma (2001) menjelaskan lebih dalam bahwa dalam pemanfaatan kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik seperti kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi dan infrastruktur, peningkatan Pendidikan, dan sebagainya. Namun, juga dapat disalahgunakan untuk keburukan seperti

memperkaya diri dan kelompok tertentu, memperkuat oligarki kekuasaan, korupsi, dan sebagainya.

1.5.4 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, Badan Usaha Milik Desa merupakan kelembagaan ekonomi desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan ushalainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Menurut (Yabbar & Hamzah, 2015) Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang sosial-ekonomi yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan dan menghapus adanya kesenjangan antar masyarakat atau desa lainnya. Selain meningkatkan kesejahteraan, BUMDes juga bergerak dibidang sosial, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berdasarkan asas kekeluargaan, kerjasama, dan gotong royong antar masyarakat desa. BUMDes harus dikelola dengan cara professional yaitu sumber daya manusia yang berkompeten. BUMDes biasanya mengelola Sumber Daya yang ada di desa seperti air, bahan pokok, serta bergerak dibidang jasa seperti pariwisata desa. Pendirian unit-unit usaha harus melibatkan dan menampung produk dari masyarakat desa melalui persetujuan pemerintah desa.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka pemikiran teoritik adalah sebagai landasan pemikiran dalam sebuah penelitian. Sehingga kerangka pemikiran teoritik ini diperlukan dan harus disusun yang didalamnya memuat pokok pikiran yang menjadi sudut pandang bagi peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

1.6.1 Teori Elite

Elite menurut Suzzana Keller (1984) adalah berasal dari kata "*elligere*", yang artinya "memilih", memilih artinya adalah bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi yang tinggi. Menurut Keller, adanya elite adalah untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kekelembagaan dengan cara yang bernilai sosial tinggi dan pada gilirannya memiliki tanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial dengan mencangkup dalam suatu proses sosial yang ada ataupun berlangsung dan kemungkinan hanya sifatnya sementara yang artinya tidak sama dalam mempertahankan hidup. Elite menunjuk pada kelompok atau individu orang di dalam masyarakat yang menempati kedudukan atau posisi tertinggi. Dengan arti yang sama, elite merupakan kelompok atau bagian dari warga masyarakat yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kelompok atau warga masyarakat lainnya, sehingga mereka yang memiliki kelebihan berada dalam kekuasaan sosial diatas masyarakat lainnya, elite selalu menduduki posisi minoritas karena dalam entitas masyarakat ada struktural organisasi yang hierarkis (Keller, 1984).

Perbedaan diantara anggota masyarakat satu sama lain dapat dikatakan sebagai awal dari munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Anggota masyarakat yang memiliki keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite kemudian yang memiliki perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan.

Elite ini adalah golongan masyarakat yang jumlahnya minoritas kemudian mewakili masyarakat untuk melakukan tujuan sosial dalam suatu tatanan sosial. Kelompok elite ini ada karena awalnya dari solidaritas organis dalam arti bahwa kekuasaan umum atau ruling elite yang mana tidak dapat berhubungan langsung dengan tiap anggota masyarakat secara individu dan akan tetapi perlu berkomunikasi dengan organ dalam masyarakat, yaitu dalam hal ini pusat kekuasaan atau strategic elite yang dikatakan oleh Suzanne Keller. Munculnya berbagai kelas dalam masyarakat yang awalnya lahir dari sejarah yaitu dari kelas kasta sampai kelas kepentingan atas kompleksitas masyarakat saat ini, kelas penentu itu lahir dari dorongan dan elite tidak jauh dengan sejarah sebagai alternatif struktural dari kelas penguasa dan kasta penguasa yang mewakili suatu bentuk kepemimpinan yang lebih berspesifikasi dan maju.

Teori elite Suzanne Keller mengasumsikan bahwa dalam lingkungan masyarakat terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. kelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan mereka disebut Elite yang berkuasa dan Elite yang tidak berkuasa. Elite yang berkuasa jumlahnya terbatas dan mempunyai kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka juga memegang semua fungsi politik untuk memonopoli kekuasaan. Elite yang berkuasa ini dalam arti menguasai jabatan formal negara, sementara elite yang tidak berkuasa adalah sekelompok elite yang berada pada lapisan kedua dalam hierarki kekuasaan elite sebagai pengganti elite yang di atasnya jika dibutuhkan.
2. Masyarakat atau orang yang diperintah, adalah masyarakat yang tidak memiliki akses ataupun sumber – sumber kekuasaan sehingga hanya menjalankan ataupun mematuhi kebijakan dan pengambilan keputusan dari para elite.

Elite mempunyai pengaruh yang kuat dalam entitas masyarakat, elite memiliki kemampuan untuk menentukan arah dari entitas masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan semakin banyaknya dimensi kekuasaan, munculnya elite juga semakin beragam dan selalu bertambah menyesuaikan dengan keahliannya masing – masing. Menjawab hal itu, Keller (1984), menjelaskan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan
3. Pertumbuhan organisasi formal / birokrasi
4. Perkembangan keagamaan moral.

Dari adanya dorongan – dorongan yang menyebabkan berkembangnya para elite, maka konsekuensinya elite semakin beranekaragam pula dan bersifat otonom. Terdapat perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, Suzanne Keller mengatakan bahwa dalam masyarakat yang tradisional tidak ada diferensiasi elite karena kondisi masyarakatnya bersifat homogen, sementara dalam masyarakat yang modern, terjadi diferensiasi elite berdasarkan empat factor tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa elite adalah golongan minoritas yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat lainnya sehingga membuat golongan elite ini jumlahnya minoritas, dalam entitas masyarakat tidak semuanya memiliki kelebihan. Kekuasaan elite merupakan pembeda yang mencolok diantara elite dan masyarakat umum. Adapun Keller menambahkan peran penting elite sebagai golongan kecil dalam masyarakat, golongan elite jumlahnya minoritas dalam hal lain meskipun tidak selalu disebutkan secara ekspilisit, sebagai berikut:

- Posisi yang mereka duduki merupakan posisi yang sentral
- Sifat-sifat yang menjadi dasar pemilihan terhadap mereka, memiliki atau tampaknya memiliki keunggulan, baik itu berupa kebijaksanaan,

keberanian, intelegensi, turunan ataupun dalam bentuk keahlian dalam pengetahuan dan ketrampilan.

- Tanggung jawab sosial, mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini daripada penduduk lainnya
- Imbalan mereka yaitu memperoleh bagian yang lebih banyak dalam hal-hal untuk kebaikan hidup

Walau golongan elite berjumlah sedikit, elite tetap memiliki peran yang sentral dalam masyarakat, posisi sentral diartikan sebagai peran penting dan tertinggi dalam tatanan masyarakat. Lalu sifat yang dimiliki elite itu sendiri adalah kelebihan yang dimiliki berupa kebijaksanaan, pengetahuan yang luas, keberanian, kewibawaan, dan keterampilan. Minoritas elite ditandai dengan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang dipimpinnya, tanggung jawab itu sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya. Contoh seperti elite politik, maka tanggung jawabnya terletak pada masyarakat yang dipimpinnya.

Keller (1984) lebih jauh menjelaskan elite yang terdiri dari kelas penguasa dan elit penentu. Keduanya memiliki perbedaan, Kelas penguasa lebih tersebar, dan permanen sehingga sangat samar untuk menentukan batasannya dengan elite penentu, memiliki keanggotaan yang kurang sukarela, jangkuan kegiatannya lebih luas dan kurang ter-spealisasi, anggotanya tidak hanya memegang jabatan dan posisi-posisi fungsional yang sama tetapi juga dalam kebiasaan-kebiasaan, agama, adat istiadat dan kebudayaan yang lebih umum. Sedangkan elite penentu sebagai lanjutan dari diferensiasi kelas penguasa, elit penentu terdiri dari perseorangan yang dipilih atas dasar motivasi dan kemampuan individual. Jumlahnya sangat terbatas dan berpusat. Dalam masyarakat industri dibutuhkan ahli – ahli yang terlatih di berbagai bidang kehidupan. Perbedaan masyarakat modern atau masyarakat industri dengan masyarakat modern yang lebih maju dalam teknologi dan kerja, dan dengan diferensiasi internal itu menimbulkan elite-elite penentu. Diferensiasi tugas elite penentu membuatnya tidak akan sewenang – wenang dibandingkan dengan kelas penguasa dan elite penentu tidak dapat menduduki suatu posisi elite

melebihi satu bidang kehidupan, maka mereka yang disebut elite penentu lebih bersifat otonom.

Suzanne Keller lebih dalam lagi memperjelas elite berdasarkan pengkhususan elite di tiap-tiap bidang. Pembagian elite-elite tersebut berdasarkan kemampuannya seperti elite politik, elite agama, elite militer, elite budaya, dan elite intelektual, semua ini disebutkan sebagai "*rulling class*". Kepemilikan pengaruh dalam *rulling class* ini disebut sebagai elite penentu. Terdapat karakteristik dari elite – elite penentu tersebut, elite penentu merupakan kristalisasi yaitu suatu perkembangan lebih dalam dari kelas – kelas penguasa, mereka dianggap setara dalam fungsinya tetapi sebagai alternatif struktural dari kelas dan kasta penguasa yang mewakili bentuk kepemimpinan sosial yang lebih maju. Memiliki keistimewaan dimana diseleksi atas kompetensi perseorangan dengan menyingkirkan yang tidak berkompeten, prinsip ini menghubungkan elite modern dengan lembaga kepemimpinan primitive seperti kepala desa, pendeta, raja, dan prajurit.

Elite (Keller, 1984), melakukan fungsi sosial yang dalam pandangannya fungsi keterwakilan, akan tetapi juga menguasai masyarakat atau elite merupakan kelompok yang unggul dengan status dan kekuasaan. Secara fungsional masyarakat butuh akan hadirnya kepemimpinan dan elite tidak pernah dapat bertindak semata-mata sesuai dengan fungsional status mereka, ketidaksempurnaan moral dan kepribadian manusia serta godaan lingkungan dan juga sifat struktur sosial dan hal ini sudah menjadi kenyataan sosiologis dan para pemimpin juga seperti orang biasa tidak menjalankan satu melainkan banyak peranan sosial. Dan mereka yang melaksanakan fungsi atas nama politik atau ekonomi harus membagi sektor terhadap peranan lainnya yang sebagai konsumen. Mereka disamping melakukan orientasi fungsional mereka dan jarang akan melakukan orientasi semacam itu saja. Penguasa dan Kelompok elite.

Teori model sosial dari Talcott Parson membantu Suzanne Keller dalam mengklasifikasi golongan elite menjadi tiga, yaitu:

- Golongan elite mewakili kepentingan umum seperti presiden, wakil rakyat, dan pejabat politik lainnya.
- Golongan elite integratif seperti Kyai, pendeta, ahli filsafat.
- Golongan elite yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder seperti seniman dan penulis.

Elite penentu (Keller, 1984) diklasifikasikan menurut kecenderungan mereka dalam memperhatikan permasalahan internal dan eksternal yang ada dalam sistem sosial. Elite integratif dan elite yang mempertahankan pola sosial tertentu diklasifikasikan sebagai elite yang memusatkan perhatian pada problema internal yang menyangkut tingkah laku moral dan aspirasi individual dan menekankan aspek-aspek simbolik dan lebih bercabang serta individualistis orientasinya. Sedangkan elite pencapai tujuan dan adaptif diklasifikasikan sebagai elite yang melihat problema eksternal seperti hubungan dengan dunia luar dan rencana untuk masa depan, elite ini cenderung untuk menekankan aspek - aspek instrumental dari tanggung jawab mereka dan sangat terorganisasi.

Keller menjelaskan elite penentu yaitu tidak selalu berkenaan dengan para pemimpin politik, ekonomi, dan militer tetapi juga mencakup pemimpin moral, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat diartikan bahwa Elite penentu dibagi menurut diferensiasi kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan dan tanggungjawab elite (Keller 1984), erat kaitannya dengan pengadaan, tanggung jawab, dan imbalan jasa elite. Elite pencapai tujuan biasanya dipilih oleh masyarakat, elite adaptasi umumnya diangkat, elite yang mempertahankan pola dipilih berdasarkan kesukaan orang banyak, dan elite integratif tidak mengikuti pola tertentu. Masalah mengenai bertahannya elite penentu dan dampaknya terhadap kontinuitas sosial. Di nilai dari sudut pandang tertentu, tentunya elite tidak akan pernah mati secara menyeluruh, oleh karena itu mereka hidup dalam ingatan

orang-orang dan bangsa-bangsa dan dalam hal ini bertahan secara simbolik memperlihatkan keabadian tertentu.

Elite penentu muncul dikarenakan pekerjaan dan kelebihannya dibutuhkan dalam masyarakat. Elite penentu didalam masyarakat tidak bersifat tunggal tetapi beberapa dan berada dalam lingkup yang kecil dan berpusat. Untuk menjadi elite penentu memerlukan sebuah keahlian tertentu dan cara elite ini dalam keluar sebagai elite karena dia sudah tidak memiliki kelebihan. Otoritas yang dimiliki oleh elit penentu merupakan otoritas yang khusus dan terbatas contohnya sebagai kyai hanya dalam lingkup keagamaan dan bukan lingkup yang lain. Elit penentu (Keller 1984) bertindak secara professional dan mewakili massa, karena massa tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya sosok yang professional yang bertanggung jawab dalam mewakili massa. Tanggungjawab elit penentu adalah memberikan tanggapan terhadap keseluruhan kehidupan sosial. Mereka merupakan penentu, yang artinya merupakan titik pusat dalam perwujudan tujuan-tujuan kolektif. Tindakan mereka, kata-kata insyarat-isyarat, kesan-kesan, dan prasangka-prasangka membawa bobot yang lebih berat dari pada yang lain karena mereka mewujudkan tindakan, cita-cita, dan sikap orang banyak. Elit penentu terorganisasikan secara formal apabila mereka ditempatkan dalam birokrasi dan mereka tidak akan tumpang tindih karena elit penentu sudah terspesialisasi.

Penjelasan mengenai elite penentu oleh Suzzane Keller maka hal ini akan penulis gunakan untuk memetakan elit lokal kedalam elit penentu salah satunya. Untuk memetakan elit penentu berdasarkan apa telah di jelaskan Keller maka penulis memilih untuk memilih juragan / pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat dalam Badan Usaha Milik Desa, Pejabat pemerintahan yaitu Kepala Desa dan BPD untuk mengetahui basis kekuatan sosial dan ekonomi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Tentang elite lokal desa yang bersifat budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang dinamis yang berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, elite, basis dan struktur sosial – ekonomi – politik dalam upaya penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa oleh Elite desa. Meneliti mulai dari siapa saja elite lokal di desa Pangkahkulon seperti kepala desa, pejabat pemerintahan, serta elite - elite lain yang terlibat. Elite – elite tersebut melalui kekuatan, kewenangan serta relasi yang terjadi antar elite lokal desa untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

1.7.2 Tipe Penelitian

Metode penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif terhadap subjek-subjek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kebanyakan riset kualitatif cenderung menggunakan pendekatan metodologi induksi; teori disusun dari observasi empiris (Harrison, 2016). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena, fakta, variabel dan keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan dari penelitian deskriptif kualitatif biasanya meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan kesimpulan.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah atau identifikasi masalah. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah dan bagaimana peneliti menganalisis hasil data yang diperolehnya. Pengumpulan data dapat diperoleh dari metode yang disebut dengan triangulasi data, meliputi; hasil wawancara mendalam, observasi, yang merupakan data primer, serta studi dokumentasi sebagai penguat dengan mendapatkan data sekunder

(Harrison, 2016). Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat dan sikap, serta pengalaman pribadi.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dipilih penulis atas kesesuaian dengan data yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif menyebut informan adalah subyek penelitian, selanjutnya peneliti akan mendapatkan informasi yang diperlukan dari subyek penelitian. Harrison (2016) mengatakan bahwa penulis harus mengetahui siapa orang yang menjadi subyek penelitian serta melakukan pengenalan pada lingkungan, sehingga subyek penelitian harus mengetahui problem – problem yang penulis ajukan.

Tabel 1.1 Subyek Penelitian

No	Subyek Penelitian	Nama Responden	Sasaran Data
1	Kepala Desa	Ahmad Fauron	Mengetahui kepentingan kepala desa dalam Pengelolaan BUMDes dan bagaimana kekuasaannya dalam BUMDes.
2	Ketua BPD	Fathur Rohman	Mengetahui kepentingan BPD dalam Pengelolaan BUMDes dan bagaimana kekuasaannya dalam BUMDes.
3	Ketua BUMDes	Hayan Hadi	Mengetahui kepentingan Ketua BUMDes dalam Pengelolaan BUMDes dan bagaimana kekuasaannya dalam BUMDes.
4	Pengusaha	Muhammad Affan	Mengetahui kepentingannya sebagai pengusaha dalam Pengelolaan BUMDes dan bagaimana kekuasaannya dalam BUMDes.
5	Kyai	Kyai Qosim	Mengetahui bagaimana kepentingan Kyai dalam Pengelolaan BUMDes dan bagaimana kekuasaannya dalam BUMDes.
6	Ketua Paguyuban Nelayan	Abdul Latif	Mengetahui kepentingan Kelompok Nelayan dalam Pengelolaan BUMDes dan bagaimana kekuasaan Ketua Nelayan dalam BUMDes.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data agar kelengkapannya tercapai, penulis membutuhkan data primer serta data sekunder, sebelum melakukan wawancara mendalam peneliti terlebih dahulu menjelaskan atau memberikan gambaran tentang latar belakang secara ringkas, jelas dan mudah dimengerti mengenai topik yang diteliti. Data primer didapat dengan cara wawancara mendalam dengan subyek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang telah ditetapkan dalam pedoman wawancara yang kemudian dapat berkembang sampai informasi yang didapat dirasa cukup. Sementara data sekunder didapat dari dokumentasi wawancara dengan merekam percakapan serta mendokumentasikan secara tertulis maupun gambar sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan baik, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman itu. Analisis data bertujuan untuk mencari hasil temuan di lapangan yang kemudian dipilah – pilah sebagai informasi pendukung.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa subyek penelitian.